

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **3.3 Latar Belakang**

Pemerintah sudah melakukan reformasi tentang pengelolaan keuangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang laporan Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) di susun dan di sajikan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Akuntabilitas dapat di artikan sebagai bentuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi oraganisasi/perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik dalam bentuk informasi laporan keuangan. Fenomena laporan keuangan di indonesia saat ini merupakan hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut dimana dari berbagai macam sumber yang di peroleh menyatakan bahwa ternyata laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai, Seperti akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah belum sesuai dengan SAP selain itu masih

banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan laporan audit pemerintah.

Penyimpangan yang terjadi dalam mengelola keuangan salah satunya yaitu terutama pada pemanfaatan APBD yang memiliki ketimpangan antara porsi belanja pegawai yang mencapai 36,8 persen dengan belanja modal yang hanya 20 persen, dikarenakan masih banyak pemerintah daerah yang lambat merealisasikan belanja modal sehingga simpanan uang anggaran di bank semakin meningkat setiap tahun, bahkan sisa lebih pembiayaan anggaran-nya makin besar. [1] Banyak kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu diteliti lebih dalam lagi. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, serta buruknya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, kurangnya kapasitas kompetisi antar staf akuntansi serta sistem pengendalian intern memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini di beberapa instansi pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Opini tersebut diberikan terhadap laporan keuangan, karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum benar, kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompentensi sebagai Staf Akuntansi yang ada.

Pemanfaatan Teknologi Informasi yang belum maksimal serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang belum memadai. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Serta untuk mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam mengelola keuangan negara. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan tersebut disajikan dengan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya, merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan. Dan setiap tahunnya, BPK memberikan penilaian berupa opini. Terdapat empat opini yang diberikan yaitu: *Unqualified Opinion* (Opini Wajar Tanpa Pengecualian), *Qualified Opinion* (Opini Wajar Dengan Pengecualian), *Adverse Opinion* (Opini Tidak Wajar), dan *Disclaimer of Opinion* (Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Opini).

Tahun 2017 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan sejumlah pejabat BPK dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengenai kasus suap yang diberikan oleh Irjen Kemendes PDTT, Sugito kepada Auditor Utama BPK, Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status WDP menjadi WTP. Irjen Kemendes PDTT, Sugito dan Pejabat Eselon III Kemendes, Jarot Budi Prabowo diduga memberikan suap Rp240 juta kepada Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri dan Auditor BPK lain yaitu Ali Sadli. [2]

Dilihat dari kasus diatas, bahwa semua pemerintah daerah sangat menginginkan opini WTP dan untuk memperoleh opini tersebut mereka akan melakukan berbagai cara, baik dengan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan fasilitas pendukung untuk akuntansi dan pelaporan keuangannya ataupun bisa melalui kerja sama dengan konsultan yang berasal dari Pemerintah seperti (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pemeriksa Keuangan) dan swasta. Tiap Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Non Kementerian di tingkat Pusat ataupun Pemerintah di tiap daerah memang terobsesi untuk mendapatkan predikat opini WTP dari BPK setiap tahunnya setelah Lembaga Negara tersebut mengaudit laporan keuangan masing-masing Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Non Kementerian di tingkat Pusat hingga Pemerintah Daerah.

Status WTP diberikan bila dalam laporan keuangan memberikan informasi yang terbebas dari salah saji material. Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangannya sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih belum dikatakan sempurna dan belum memenuhi kriteria keterandalan (*reliability*), kepatuhan (*compliance*) dan ketepatan waktu (*timeliness*). Mengingat bahwa keterandalan dan ketepatan waktu merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, peneliti tertarik untuk meneliti hal apa yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2017 atas LKPD seluruh Indonesia Tahun 2016, BPK memeriksa 537 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2016. Sedangkan 5 pemerintah daerah lainnya terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Pidie, Pemkab Pidie Jaya, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe di wilayah Provinsi Aceh. Dari hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas 375 (70%) LKPD, opini WDP atas 139 (26%) LKPD, dan opini TMP atas 23 (4%) LKPD. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini TP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%).[3]

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : (1) pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, (2) proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan SAP, (3) terlambat menyampaikan LKPD, (4) sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, (5) sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai, serta (6) masih lemahnya sistem pengendalian intern. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum optimal.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diungkapkan bahwasanya, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan ukuran normatif antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, maka pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah tidak terlepas dari peran staf akuntansi selaku Sumber Daya Manusia yang berperan sebagai pihak yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang akuntansi. Sebagai wujud dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia merupakan elemen dari

organisasi yang memiliki peran sangat penting. Sehingga harus dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang dimaksud oleh organisasi bersangkutan. Sumber daya manusia yang memahami logika akuntansi dapat mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Namun faktanya di Indonesia, kita masih kekurangan kapasitas SDM yang mengelola keuangan negara khususnya yang memiliki kelemahan dibidang akuntansi. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017, masih terdapat 162 dari 537 pemda yang memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai SAP, terutama pada akun-akun yang disajikan antara lain pada penyajian akun aset lancar, akun aset tetap, akun aset lainnya, akun lain-lain pendapatan daerah yang sah, akun belanja operasi, akun belanja modal, akun beban operasi, dan akun lainnya. Dapat disimpulkan, kapasitas sumber daya manusia dari 162 pemda belum optimal.

Selain kapasitas SDM Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga berperan sebagai metode untuk mengawasi dan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan pemda untuk meningkatkan kualitas laporannya, sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat terlaksana. Menurut BPK RI, kelemahan sistem pengendalian intern merupakan faktor yang menyebabkan pengecualian opini LKPD. Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah, menyebabkan kesalahan dalam pencatatan serta penyimpangan laporan keuangan. Dengan adanya penyimpangan terhadap laporan keuangan, maka dapat dikatakan LKPD tersebut belum memenuhi karakteristik yang disyaratkan, yaitu

keterandalan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017, faktanya masih terdapat 6.053 kelemahan terhadap sistem pengendalian intern, yang terdiri dari 2.156 permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.240 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah belum optimal

Sistem pengendalian intern sendiri harus dijalankan oleh komisaris, manajemen dan seluruh elemen yang ada di perusahaan guna mencapai tujuan dalam keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu faktor permasalahan lain yang muncul dalam penyusunan laporan keuangan adalah kurang memahami sistem SAP berbasis akrual secara komprehensif, dalam hal ini terkait dengan kemampuan kapasitas sumber daya manusia.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi dan



kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah bahkan organisasi tentang pemerintah.

Kegagalan sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah [4]. Kualitas informasi laporan keuangan sendiri harus memenuhi karakteristik kualitas informasi akuntansi agar benar-benar bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategi. Informasi laporan keuangan harus relevan, dapat dimengerti, bisa diuji, tepat waktu dan bisa dipercaya serta memiliki daya banding.

Sebelumnya banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian dan Kapasitas, Sumber Daya Manusia serta Faktor Eksternal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh [5] *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi* menunjukkan bahwa semua variabel independen sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh antara variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [6] yang berjudul *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem*

*Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Moderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.* Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebagai pemoderasi, variabel tidak dapat memoderasi antara variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Pada Penelitian [7] yang berjudul *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia , Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Lingkungan Eksternal Variabel Moderating* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [8] dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi Dan Pemahaman Basi Aktual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Organisasi Daerah Provinsi Banten* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman atas sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian [9] yang berjudul *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalin Intern Pemerintah*

*Sebagai Variabel Moderating* menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderasi dapat memperkuat korelasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian [10] yang berjudul *Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin, Jambi* hasil penelitian dari variabel yang di uji faktor yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah kabupaten merangin, jambi adalah penerapan standar akuntansi pemerintah , kualitas teknologi dan informasi yang berkembang, sistem pengendalian intern dapat memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas informasi laporan keuangan OPD Kabupaten Merangin dan juga penelitian oleh [11]yang berjudul *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dearah, Kompetensi sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intrern Terhadap Kualitas Informasi Llaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Sebagai Variabel Moderasi*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini juga membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah serta untuk sistem pengendalian intern

perpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan dari fenomena diatas peneliti mengambil judul penelitian dengan judul “ **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN FAKTOR EKSTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING** “

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa pokok masalah, antara lain:

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum optimal di beberapa pemerintah daerah di Indonesia, ditunjukkan dengan 162 dari 537 LKPD yang belum memperoleh opini WTP.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah belum digunakan secara optimal di beberapa pemerintah daerah di Indonesia, ditunjukkan dengan terdapat banyak permasalahan sistem pengendalian intern.
3. Kurangnya penerapan standar akuntansi dan lemahnya sistem pengendalian intern dilihat dari penyusunan laporan keuangan, antara lain penatausahaan kas yang belum memadai, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual belum optimal.
4. Kapasitas sumber daya manusia beberapa pemerintah daerah di Indonesia belum optimal, ditunjukkan dengan masih terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP.

5. Adanya penataan pegawai ( SDM ) sering kali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas.
6. Dari temuan kasus yang di uraikan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik kualitatif, laporan keuangan belum menunjukkan kualitas yang baik. Faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah berdasarkan oleh beberapa peneliti adalah sistem pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia,serta faktor eksternal seperti pemanfaatan teknologi, penerapan sistem informasi pemerintah, peran PKK-SKPD.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini difokuskan pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah . Oleh karena banyak faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian ini meneliti tiga faktor yang diduga berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Sistem Pengendalian Intern, Kapasitas Sumber Daya Manusia, serta Faktor Eksternal sebagai pemoderasi. Pemilihan faktor-faktor diatas, diduga karena faktor-faktor tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Pengawasan terhadap pengelolaan laporan keuangan dalam instansi pemerintah sangat penting dilakukan dalam mencapai tujuan dari suatu instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas informasi laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah . Maka berdasarkan dari latar belakang dan uraian tersebut peneliti menetapkan rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan ?
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan ?
3. Apakah faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan ?
4. Apakah faktor eksternal memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan ?

### **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka penelitian ini untuk mempelajari serta menilai pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan

faktor internal sebagai variabel moderating. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan
3. Untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan
4. Untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal dalam memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut, maka peneliti menyimpulkan manfaat dari penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada dunia nyata juga sebagai syarat dalam memenuhi

pengajuan tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan tambahan ilmu untuk badan pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan agar dapat memperbaiki kesalahan –kesalahan dalam menyusun laporan keuangan sehingga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di indonesia untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan instansi pemerintah.

## 3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan serta faktor eksternal sebagai memoderasinya.

## 4. Bagi Pihak Umum

Sebagai bahan referensi untuk mengkaji pembahasan masalah yang diteliti dalam penelitian ini dan untuk menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.